

MeDīNA-Tē

JURNAL STUDI ISLAM

VOL. 2, NOMOR 1, JUNI 2011

ISSN : 1858 - 3237



Diterbitkan oleh :
Program Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah
Palembang

**PENGUNAAN SOFTWARE ILEGAL DI KALANGAN DOSEN
IAIN RADEN FATAH PALEMBANG**

Ahmad Syukri*

تمهيد: استخدام برامج الحاسب الآلي من قبل مدرّس IAIN باليمبانج فتح رادين، بدءاً من برامج الحاسوب لأغراض المكتبية وكذلك لأغراض تعليمية. حماية برامج الكمبيوتر بموجب القانون حق المؤلف. ملاحظات أولية على أرض الواقع التي تبين ما زالت تبدو محاضر IAIN رادين فتح باليمبانج الذين يستخدمون برامج غير قانونية، ودون الشهادة الأصلية من البرامج التسمية. الهدف من هذا البحث هو الدائم محاضر IAIN رادين فتح. هذا النوع من دراسة مسحية وصفية مع النهج الكمي. وكان السكان في هذه الدراسة كافة الدائم محاضر IAIN رادين فتح باليمبانج. جمع البيانات الأولية من خلال استبيانات بالإضافة إلى المقابلات، والملاحظة ودراسة الكتاب. في هذه الدراسة أظهرت أن جميع المحاضرين IAIN رادين فتح باليمبانج باستخدام نظام التشغيل نوع برامج التشغيل (OS) مايكروسوفت ويندوز وبرامج المكتب) مكتب برنامج تطبيق (باستخدام Microsoft Office. 85.5٪ من محاضر الدولة الإسلامية معهد رادين باليمبانج فتح لا تزال تستخدم برمجيات غير قانونية، فقط 14.5 ٪ استخدام البرمجيات قانوناً. وقال 18.5 ٪ من المستطلعين ما يصل إلى 53.5 ٪ من أفراد العينة التي لا تزال تستخدم البرنامج السبب الرئيسي غير قانونية لأنه من السهل، لأن الرد على مظهر جذاب من قبل المشاركين بقدر 12 ٪، والسبب رخصة و 13.5 ٪ من المستطلعين أجاب أبداً حاول نظام التشغيل والبرمجيات المكتبية تطبيق البرمجيات الأخرى من نظام التشغيل Microsoft Windows و Microsoft Office. ضد مسألة استخدام حلول برمجية غير قانونية تقدم بدائل لصانعي السياسة في فتح IAIN باليمبانج رادين، حل بديل ألا وهي (أ): حل Microsoft حرم الاتفاق (MCA)، على رخصة خاصة لاستخدام منتجات Microsoft الأوساط الأكاديمية، والبدائل (ب): فتح اتفاق حرم المصدر (OSCA)، وتراخيص استخدام برمجيات المصدر المفتوح هو القانونية دون حدود مع أي برنامج الشيفرة المصدرية المفتوحة هي أيضاً مدعومة من قبل الحكومة مع IGOS (Indonesia Go Open Source) (البرنامج) اندونيسيا الذهاب مفتوح المصدر.

* Ahmad Syukri adalah dosen Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang, alumni Pps. Universitas Padjajaran Bandung.

Abstract: Lecturers of IAIN Raden Fatah Palembang use computer software for office purposes as well for educational purposes. This computer software is protected by copyright law. However, preliminary observations showed that some of lecturers of IAIN Raden Fatah Palembang still use illegal software, without the original certificate label from the software. Object of this research is permanent lecturers of IAIN Raden Fatah. It is a survey descriptive study with quantitative approach. The populations in this study are all of permanent lecturers of IAIN Raden Fatah Palembang. Primary data were collected through questionnaires plus interviews, observation and literature study. This study showed that all the lecturers of IAIN Raden Fatah Palembang use Microsoft Windows for Operating System Software and Microsoft Office for Office Application Software. 85.5% lecturers of IAIN Raden Fatah Palembang still use illegal software, and only 14.5% use legal software. 53.5% of respondents use illegal software because it is easy, 12% because it has attractive appearance, 18.5% because it is cheap, and 13.5% of respondents answered that they never tried other Operating System and Office Application Software, except Microsoft Windows and Microsoft Office. Against this issue, there are some solution alternatives for policy makers in IAIN Raden Fatah Palembang, namely (a) Microsoft Campus Agreement (MCA), a special license to use Microsoft products for academia, and (b) Open Source Campus Agreement (OSCA), a license for using unlimited legal open source software with open program source code that is also supported by the government with IGOS program (Indonesia Go Open Source).

Kata Kunci: *Software ilegal, software komputer, HKI, Open source, MCA, OSCA*

Pendahuluan

Perkembangan yang pesat pada bidang teknologi informasi saat ini memunculkan keniscayaan bahwasannya setiap aspek kehidupan sangat memudahkan dengan teknologi informasi. Pemanfaatan Teknologi Informasi sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Penggunaan telepon, handphone, mesin ATM, Internet, dan lain-lain sudah tidak menjadi sesuatu yang baru atau aneh.

Di Indonesia penggunaan Teknologi Informasi sudah diterapkan di sekolah-sekolah, baik sebagai perangkat administratif ataupun sebagai kurikulum pendidikan. Pelajaran komputer sudah diajarkan dari tingkat SLTP dan SMU, bahkan di beberapa tempat sudah sejak mulai dari SD. Teknologi informasi juga dimanfaatkan oleh di perguruan tinggi antara lain adalah sebagai alat bantu untuk proses administrasi dan pendidikan. Komputer, database, sistem

informasi kemahasiswaan digunakan untuk membantu proses administrasi.

Kegiatan surat menyurat dan pengarsipan sudah dilakukan dengan menggunakan komputer. Di kota besar, jarang ditemui perguruan tinggi yang masih menggunakan mesin ketik untuk menuliskan surat. Meski demikian komputer bukan hanya sebagai pengganti mesin ketik. Jika komputer diambil, proses administrasi akan terganggu. Ini menunjukkan bahwa pemanfaatan komputer untuk proses administrasi sangat esensial di perguruan tinggi.

Dosen merupakan ujung tombak utama dalam sebuah perguruan tinggi. Sebagai profesi yang bertugas meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan menghasilkan lulusan yang unggul secara intelektual, moral, serta memiliki komitmen yang tinggi dalam berbagai peran sosial. Seorang dosen juga dituntut harus mampu mentransformasikan ilmu pengetahuan yang dia miliki kepada mahasiswa di perguruan tinggi dimana mereka mengabdikan.

Software komputer digunakan untuk membantu dosen dalam memberikan mata pelajaran, presentasi dan memberi nilai. software komputer merupakan salah satu bentuk implementasi dari teknologi informasi yang paling banyak digunakan. Berdasarkan observasi peneliti, berbagai software komputer digunakan di IAIN Raden Fatah Palembang, mulai dari software komputer untuk keperluan perkantoran (*Office Application Software*) dan juga untuk keperluan pendidikan (presentasi, dokumentasi, penilaian). Dalam Penelitian ini lebih difokuskan pada jenis software dalam bentuk Sistem Operasi (*Operating System Software*) dan software komputer untuk keperluan perkantoran (*Office Application Software*).

Software Komputer sebagai hasil pemikiran intelektual dari pembuat program adalah diakui sebagai suatu Karya Cipta, yaitu karya dari perwujudan cipta, rasa, dan karsanya. Hal inilah yang dilindungi oleh hukum. Obyek perlindungan sebuah Program komputer adalah serangkaian kode yang mengisi instruksi. Instruksi-instruksi dan bahasa yang tertulis ini dirancang untuk mengatur *microprocessor* agar dapat melakukan tugas-tugas sederhana yang dikehendaki secara tahap demi tahap serta untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Dan didalam instruksi inilah terlihat ekspresi dari si pembuat program atau pencipta (Makarim, 2004 :256).

Di Indonesia, Perlindungan terhadap karya cipta seseorang diatur dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Mengingat banyaknya program komputer dimanfaatkan oleh perguruan tinggi, sudah seharusnya Perguruan Tinggi memberikan apresiasi yang baik terhadap karya cipta intelektual tersebut.

Namun berdasarkan observasi awal di lapangan yang dilakukan oleh peneliti, masih terlihat Dosen IAIN Raden Fatah Palembang yang menggunakan software ilegal. Ilegal disini artinya

software komputer tersebut tidak mempunyai lisensi resmi atau membeli pada tempat yang resmi menjual *software* komputer tersebut. Hal tersebut dapat diketahui dari tidak dimilikinya label sertifikat keaslian *software* komputer tersebut.

Ketika civitas dunia pendidikan mulai menggunakan *software* Komputer ilegal dan akhirnya merasa bahwa hal itu adalah hal yang biasa saja padahal itu merupakan hal yang sangat bertentangan dengan etika, moral dan hukum, apalagi di lingkungan pendidikan seperti di IAIN Raden Fatah yang mengemban misi pendidikan dan moral islami. Di satu sisi, perguruan tinggi melakukan pelanggaran Hak Cipta dengan menggunakan *software* ilegal. Di sisi lain perguruan tinggi juga mengharapkan hasil Karya Ciptanya agar dihargai dan tidak dibajak.

Penggunaan Program Komputer Secara Ilegal sendiri melanggar UU No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang dalam ketentuannya menyatakan bahwa selain tuntutan ganti rugi, tidak menutup kemungkinan dilakukannya tuntutan secara pidana atas pelanggaran hak cipta Program Komputer. Hal ini disebutkan dalam pasal 72 ayat 3 UUHC sebagai berikut: "Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan atau denda paling banyak Rp 500.000.000".

Ditambah lagi dengan adanya Fatwa MUI Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) yang menyatakan bahwa HKI (Hak kekayaan Intelektual) dipandang sebagai *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashu*) sebagaimana *mal* (kekayaan). Dimana Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dirasakan perlu untuk mengadakan penelitian tentang Penggunaan *Software* Ilegal di Kalangan Dosen IAIN Raden Fatah. Selanjutnya akan diangkat dalam bentuk penelitian dengan judul "Penggunaan *Software* Ilegal Di Kalangan Dosen Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang".

Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Intensitas penggunaan *software* ilegal di kalangan Dosen Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang ?
2. Mengapa *software* ilegal tetap digunakan di kalangan Dosen Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang ?

3. Apa Upaya yang dapat dilakukan oleh Penentu Kebijakan di Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang berkenaan dengan Isu Penggunaan *Software* Ilegal di Kalangan Dosen IAIN Raden Fatah Palembang ?

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh gambaran data dan informasi mengenai Intesitas penggunaan *Software* ilegal oleh Dosen Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. Untuk mengetahui Alasan Dosen Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang Menggunakan Program *Software* Ilegal.
3. Untuk memberikan rekomendasi kepada Penentu Kebijakan di Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang berkenaan dengan Isu Penggunaan *Software* Ilegal di Kalangan Dosen IAIN Raden Fatah Palembang

Adapun Manfaat Penelitian yang diharapkan adalah :

1. Untuk kepentingan akademis, penelitian ini dapat berguna sebagai pengembangan wawasan dan konsep Ilmu pengetahuan di Bidang Hukum Hak Kekayaan Intelektual dan Analisis Kebijakan Publik
2. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan analisis dan rekomendasi Kebijakan kepada Rektor IAIN Raden Fatah Palembang agar dapat memfasilitasi dan mensosialisasikan penggunaan *Software* Legal dan halal di Lingkungan IAIN Raden Fatah Palembang.

Kerangka Teori

Tugas Pokok Institut Agama Islam Negeri, yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No.33/1985, yakni "menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di atas perguruan tingkat menengah yang berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia dan secara ilmiah memberikan pendidikan pada masyarakat di bidang ilmu pengetahuan agama Islam sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku." Untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, IAIN Raden Fatah Palembang telah memiliki tenaga Dosen yang sesuai dengan bidang dan kemampuan yang diharapkan dapat memberikan pendidikan pada masyarakat di bidang ilmu pengetahuan agama Islam.

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.¹ Dalam era informasi ini untuk transformasikan ilmu pengetahuan yang dosen miliki kepada mahasiswa digunakanlah media computer

¹ UU No 14 Tahun 2005 Pasal 1 (2)

yang didalamnya terdapat program komputer baik untuk keperluan perkantoran maupun keperluan akademik.

Menurut Andi Hamzah (1990:1), Institut Komputer Indonesia mendefinisikan komputer sebagai berikut: "Suatu rangkaian peralatan-peralatan dan fasilitas yang bekerja secara elektronis, bekerja dibawah kontrol suatu *operating system*, melaksanakan pekerjaan berdasarkan rangkaian instruksi-instruksi yang disebut program serta mempunyai internal *storage* yang digunakan untuk menyimpan *operating system*, program dan data yang diolah."

Berikutnya Menurut John J. Borking menyatakan pengertian program Komputer sebagai berikut :, "*In essence, a computer program is a set of instructions in the form of numeric codes, which are loaded into the computer's memory in order to tell the computer in what way a problem has to be solved.*" (Borking, 1988: 33)

Menurut Pasal 1 ayat 8 Undang –Undang Nomor 19 Tahun 2002, "Program Komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut."

Berkenaan dengan pengertian Program Komputer, Edmon Makarim menyatakan bahwa , " perlu dibedakan antara pengertian Piranti Lunak (*software*) dengan Program Komputer, dimana satu *software* dapat terdiri dari beberapa program komputer, dan program komputer sendiri adalah seperangkat perintah kepada perangkat kerasn komputer untuk melakukan pekerjaan tertentu (Makarim, 2004 : 70).

Secara teknis Program Komputer dibedakan atas Program Komputer sistem operasi dan Program Komputer aplikasi (Makarim, 2004:72). Sistem operasi sangat menentukan bagaimana suatu *hardware* komputer bekerja, berkomunikasi dan dimanfaatkan untuk berbagai hal. Suatu *sistem operasi* yang handal akan menjamin aplikasi-aplikasi yang berjalan di atas nya, pada suatu tingkat ke stabilan proses dan keamanan tertentu. Menurut UU No 19 tahun 2002 pasal 12 ayat 1 poin a dinyatakan bahwa program komputer termasuk dalam Ciptaan yang dilindungi Undang-Undang dalam bidang Ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Keberadaan hak cipta pada awalnya sangat dipengaruhi oleh sistem hukum. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Carolyn Hotchkiss yang menyatakan:

" Copyright law has used three different approaches in its development. For civil law countries, copyright has protected both the economic and moral rights of authors. Under civil law systems, owner of copyrights still may have to recognize the

rights of the original authors... Common law legal systems tend to view copyrights as a protection solely of economic interest. Socialist legal systems have historically been less concerned with payment to authors than with the management of culture for the purposes of the revolution". (Hotchkiss, 1994:305-306)

Melihat pernyataan Hotchkiss tersebut sangat jelas bahwa hak cipta juga sangat dipengaruhi oleh sistem hukum yang berlaku di suatu negara.

Sebuah program komputer diakui sebagai hak cipta yang dilindungi undang-undang yang berlaku di Indonesia. Pada tataran praktis di lapangan masih banyak timbul pelanggaran hak cipta berkenaan dengan Program Komputer yang biasa diistilahkan dengan pembajakan *software*. Menurut Anti Suryaman ada 6 tipe pembajakan *software* yang biasa ditemukan, yaitu :

- I. Memperbanyak dengan cara mengkopi :
 - Instalasi *software* yang dilakukan perusahaan melebihi jumlah lisensi yang dimiliki
 - b.Meminjamkan *software* untuk diinstall di komputer lain diantara teman maupun keluarga
- II. *Counterfeiting/Pemalsuan software*; menduplikasi dan mendistribusikan *software* mitasi dalam jumlah tertentu.
- III. *Hard disk loading*; biasanya dilakukan oleh perakit komputer yang melakukan instalasi menggunakan *software* bajakan
- IV. *Mischannelling*; *software* yang dijual/didistribusikan ke tipe customer yang salah, misalnya *charity* atau *academic price* (yang memang dapat dibeli dengan harga yang lebih murah) tetapi kemudian dijual ke *customer* biasa/perusahaan komersial
- V. *Fake licensing/Lisensi Palsu*; hal ini terjadi jika *End User License Agreements* (EULAs) dijual secara terpisah sebagai lisensi
- VI. *Internet Piracy/Penjualan barang palsu lewat internet*; penggunaan internet untuk pendistribusian *software* ilegal, dengan harga lebih rendah dari harga sesungguhnya. (Suryawan, 2005 :1)

Metode Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dengan Obyek penelitiannya adalah Dosen Tetap IAIN Raden Fatah Palembang yang merupakan tenaga pendidik dan pengguna aktif komputer untuk berbagai macam keperluan akademis di Perguruan Tinggi.

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif survei. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang

dilakukan terhadap variabel mandiri, tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lain(Sugiyono, 2002:6). Kerlinger (dalam Riduwan, 2006:49) mengatakan bahwa : "penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis."

Data primer diperoleh dengan cara penyebaran kuesioner, observasi serta wawancara dengan responden. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi dan penelusuran literatur yang berkaitan dengan *Software* Ilegal di Perguruan Tinggi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2005 : 57).

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Dosen Tetap di Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, sehingga populasi dalam penelitian ini adalah semua Dosen Tetap IAIN Raden Fatah Palembang.

Tabel 1
Jumlah Populasi Penelitian Dan Rinciannya

NO	FAKULTAS	JUMLAH
1	SYARI'AH	83
2	TARBIYAH	87
3	USHULUDDIN	55
4	DAKWAH	34
5	ADAB	37
JUMLAH		296

Untuk mendapatkan sampel digunakan teknik *Purposive random sampling*, dimana setelah peneliti mendapatkan data awal tentang jumlah dosen, peneliti akan mengelompokkan terlebih dahulu berdasar fakultas masing-masing, setelah itu peneliti akan mengambil sampel.

Surakhmad (1994:100) berpendapat apabila ukuran populasi sebanyak kurang lebih dari 100, maka pengambilan sample sekurang-kurangnya 50% dari ukuran populasi. Sampel dari populasi diatas terinci sebagaimana pada tabel 2

Tabel 2
Rincian Sampel Penelitian

FAKULTAS	DOSEN	JUMLAH SAMPEL
SYARIAH	83	41
TARBIYAH	87	43
USHULUDDIN	55	27
DAKWAH	34	17
ADAB	37	18
JUMLAH	296	146

Jenis data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner, wawancara dan observasi .

Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka, yaitu dengan mempelajari referensi dan hasil laporan.

Dalam penelitian survei, kuesioner adalah merupakan alat pengumpulan data yang pokok. Penyebaran kuesioner dimaksudkan untuk menanyakan tentang fakta, perasaan dan sikap, informasi, serta persepsi diri responden mengenai fenomena yang tertuang dalam variabel penelitian. Hasil kuesioner tersebut digunakan sebagai landasan analisis data kuantitatif. (Singarimbun, 1995 : 175-177)

Wawancara, yaitu dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan fenomena yang diamati, yang belum terungkap atau kesulitan untuk digali melalui kuisisioner. Wawancara dilakukan pada 3 (tiga) orang perwakilan Dosen di tiap Fakultas

Observasi, yaitu pengamatan langsung ke lokasi penelitian untuk melengkapi dan mendukung data primer yang diperoleh melalui kuesioner.

Analisis data bertujuan untuk membuat proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan (Singarimbun , 1995 : 263). Data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner, hasil observasi dan wawancara dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif.

Data dianalisis dengan analisis deskriptif yang menggambarkan sejumlah variable yang diteliti tanpa melakukan pengujian jalinan (hubungan) antar variable yang diteliti. Analisis data dilakukan dengan persentase terhadap tiap kelompok data bukan terhadap total responden. Dengan demikian, gambaran nilai adalah gambaran dari responden kelompoknya.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini difokuskan pada tingkat penggunaan software ilegal di Kalangan Dosen IAIN Raden Fatah Palembang, alasan dalam penggunaannya serta tawaran solusi berkenaan dengan isu penggunaan software ilegal tersebut. Penelitian ini dilakukan di Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan 146 orang Dosen Tetap sebagai responden.

Agar analisa data penelitian yang terkumpul mudah dipahami maka ada beberapa parameter yang dipakai untuk mengukur Intensitas penggunaan *Software* ilegal di kalangan Dosen Institut Agama Islam Negeri Palembang dapat dilihat dari data tabel hasil penelitian sebagai berikut:

Tabel 10
Jawaban Responden Tentang Intensitas Penggunaan Jenis Software Sistem Operasi (OS) yang digunakan (n=146)

Jawaban	Frekuensi (f)	(%)
a. Microsoft Windows	146	100
b. Apple Mcintosh	0	0
c. Linux	0	0
d. OS Lainnya	0	0
Jumlah	146	100

Sumber : Data diolah dari Data Lapangan, 2010

Berdasarkan data Tabel 10 diatas dapat kita lihat bahwa penggunaan Jenis *Software* Sistem Operasi (OS) yang digunakan oleh Dosen IAIN Raden Fatah Palembang yang mencapai intensitas penggunaan 100% adalah Jenis OS Microsoft Windows, dengan segala variannya seperti Windows 98, Windows XP, Windows Vista dan Windows 7.

Tabel 11
Jawaban Responden Tentang Intensitas Penggunaan Jenis software untuk keperluan perkantoran (*Office Application Software*) yang digunakan oleh Dosen IAIN Raden Fatah Palembang (n=146)

Jawaban	Frekuensi (f)	(%)
a. Ms Office	146	100%
b. Mac Office	0	0
c. Open Office	0	0
d. Lainnya	0	0
Jumlah	146	100

Sumber : Data diolah dari Data Lapangan, 2010

Berdasarkan data Tabel 11 dapat kita lihat bahwa penggunaan Jenis untuk keperluan perkantoran (*Office Application Software*) yang digunakan oleh Dosen IAIN Raden Fatah Palembang yang mencapai intensitas penggunaan 100% adalah Microsoft Office, dengan segala variannya seperti MS Office 2003 dan Ms Office 2007.

Data Tabel 10 dan Tabel 11 menunjukkan bahwa semua dosen IAIN Raden Fatah Palembang menggunakan Jenis *Software* Sistem Operasi (OS) Microsoft Windows dan *software* untuk keperluan perkantoran (*Office Application Software*) menggunakan Microsoft Office. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis, penggunaan Produk dari Microsoft sudah sangat umum di lingkungan Dosen IAIN Raden Fatah Palembang. Orang akan menanyakan Windows dan Ms Office apa yang digunakan bukan OS apa dan Office jenis apa yang dipakai.

Microsoft Windows dan Microsoft Office termasuk dalam Jenis *Proprietary Software*. Untuk mendapatkan legalitas lisensinya kita harus membayar atau membeli sesuai dengan ketentuan harga penjualan *software* dari Microsoft. Saat ini, paling tidak ada beberapa Sistem Operasi yang bisa diinstall ke *personal computer* (PC) atau Notebook, yaitu Microsoft Windows, MacOSX, GNU/Linux, OpenSolaris dan GoogleOS. Kecuali Windows, keempat sistem operasi tersebut berasal dari keluarga Unix. Untuk jenis *software Open Source*, tidak harus membayar atau membeli, hanya ada biaya dalam pengemasan, instalasi, *support* dan pelatihan. Dalam hal ada biaya lisensi, hampir semua biaya lisensi aplikasi FOSS lebih murah dibandingkan lisensi *Software proprietary*.

Tabel 12
Jawaban Responden Tentang Kepemilikan lisensi keaslian dari
vendor resmi *software* Sistem Operasi (OS) yang mereka
gunakan (n=146)

Jawaban	Frekuensi (f)	(%)
a. Ada	31	21%
b. Tidak Ada	115	79 %
Jumlah	146	100 %

Sumber : Data diolah dari Data Lapangan, 2010

Berdasarkan data Tabel 12 tentang Kepemilikan lisensi keaslian dari vendor resmi *software* Sistem Operasi (OS), sebanyak

31 responden menjawab Ada (21%) dan 115 Responden menyatakan tidak ada (79%). Dari data tersebut dapat dinyatakan bahwa 79% Dosen IAIN Raden Fatah Palembang masih menggunakan *Software Sistem Operasi* ilegal. Berdasarkan wawancara penulis bahwa label sertifikat keaslian dari Microsoft biasanya langsung termasuk dalam paket pembelian komputer personal atau Notebook, dan harganya menjadi lebih mahal dari paket komputer atau notebook tanpa Sistem Operasi (OS).

Tabel 13
Jawaban Responden Kepemilikan lisensi keaslian dari vendor resmi software komputer untuk keperluan perkantoran (*Office Application Software*) yang mereka gunakan (n=146)

Jawaban	Frekuensi (f)	Persen (%)
a. Ada	12	8%
b. Tidak Ada	134	92 %
Jumlah	146	100 %

Sumber : Data diolah dari Data Lapangan, 2010

Data Tabel 13 tentang Kepemilikan lisensi keaslian dari vendor resmi software komputer untuk keperluan perkantoran (*Office Application Software*), sebanyak 12 responden menjawab Ada (8%) dan 134 Responden menyatakan tidak ada (92%). Dari data tersebut dapat dinyatakan bahwa 92% Dosen IAIN Raden Fatah Palembang masih menggunakan software komputer untuk keperluan perkantoran (*Office Application Software*) ilegal, dan hanya 8 % yang menggunakan software komputer untuk keperluan perkantoran (*Office Application Software*) legal .

Berdasarkan wawancara penulis bahwa label sertifikat keaslian dari Microsoft pada *Software Microsoft office* biasanya langsung termasuk dalam paket pembelian komputer personal atau Notebook hanya saja harganya menjadi lebih mahal dari komputer yang hanya termasuk paket Pembelian *Software Sistem Operasi (OS)* atau komputer tanpa OS. Label sertifikat keaslian tersebut ditempel pada personal komputer atau notebook dan sangat sulit untuk dilepas. Jika dipaksa dilepas label tersebut akan rusak.

Dari tabel 12 dan Tabel 13 tersebut kemudian dapat kita generalisasi melalui data rata-rata persentase dalam tabel 14 sebagai berikut :

Tabel 14
Intensitas Penggunaan Software Ilegal di Kalangan Dosen IAIN Raden Fatah Palembang dilihat dari Kepemilikan Lisensi Keaslian Software

Jenis Software	Status Lisensi			
	Ada	%	Tidak Ada	%
Software Sistem Operasi (OS)	31	21	115	79
Office Application Software	12	8	134	92
Jumlah rata rata	21,5	14,5	124,5	85,5

Tabel 14 diatas memperlihatkan bahwa 85,5% Dosen Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang masih menggunakan Software Ilegal., dan hanya 14,5 % menggunakan Software legal. Ilegal disini dalam arti tidak dimilikinya lisensi Keaslian software tersebut yang biasanya dalam bentuk label Sertifikat keaslian (COA). Keberadaan lisensi ini sangat penting sebagai bentuk legalitas sebuah *Proprietary Software* seperti Microsoft Windows dan Microsoft sebagai software yang sangat populer di kalangan Dosen IAIN Raden Fatah Palembang.

Selama bertahun-tahun, Microsoft telah menerapkan beberapa teknologi anti-pembajakan. Sebagaimana program kami berkembang melalui versi yang berbeda, begitu juga label Sertifikat Keaslian (*Certificate Of Authenticity* (COA)) yang terkait. *Certificate of Authenticity* (COA) adalah label yang membantu pengguna mengenali perangkat lunak Microsoft asli. Perangkat lunak ritel Microsoft dipasarkan dengan COA yang sudah ditempelkan pada bagian luar kemasannya. Jika COA tidak ada pada kemasan, berarti bukan perangkat lunak asli dan tidak berlisensi dengan benar. COA tidak dapat dibeli tanpa perangkat lunak yang mengesahkannya. *Software* Microsoft asli yang dibeli bersama komputer baru biasanya telah disertai dengan media pemulihan. Media pemulihan adalah CD/DVD instalasi yang digunakan untuk memulihkan perangkat lunak Microsoft Anda seandainya rusak.

Setelah membahas intensitas penggunaan Software Ilegal di kalangan Dosen IAIN Raden Fatah Palembang, selanjutnya penulis akan menganalisa data hasil penelitian tentang alasan *software ilegal* tetap digunakan di kalangan dosen IAIN Raden Fatah Palembang. Untuk mengetahui alasan yang ada, penulis menampilkan beberapa alasan yaitu alasan karena mudah digunakan, tampilan menarik, Murah (dibawah harga Rp.50.000,-), belum pernah mencoba Software OS atau Office Application Software Lain dan Alasan lainnya. Data lapangan berkenaan dengan alasan dalam penggunaan Jenis *Software* Sistem Operasi (OS) dan *Office Application software* yang digunakan disajikan dalam tabel 15 dan tabel 16 berikut ini :

Tabel 15
Jawaban Responden tentang Alasan Menggunakan Jenis
Software Sistem Operasi (OS) (n=146)

Jawaban	Frekuensi (f)	Persen (%)
a. Mudah digunakan	73	50%
b. Tampilan Menarik	18	12%
c. Murah (> Rp 50.000)	30	21%
d. Belum Pernah Coba OS lain	25	17%
e. Lainnya	0	0
Jumlah	146	100 %

Sumber : Data diolah dari Data Lapangan, 2010

Dari Tabel 15 dapat dilihat bahwa sebanyak 73 responden menjawab Mudah digunakan (50%), 18 responden menjawab tampilan menarik (12%), 30 responden menjawab Murah (> Rp.50.000) (21%), dan 25 responden menjawab belum pernah coba OS lainnya (17 %).

Tabel 16
Jawaban Responden tentang Alasan Menggunakan software
Komputer Untuk Keperluan Perkantoran (Office Application
Software) (n=146)

Jawaban	Frekuensi (f)	Persen (%)
c. Mudah digunakan	84	57%
d. Tampilan Menarik	17	12%
c. Murah (> Rp 50.000)	23	16%
e. Belum Pernah Coba office software lain	14	10%
e. Lainnya	0	0
Jumlah	146	100 %

Sumber : Data diolah dari Data Lapangan, 2010

Berdasarkan data Tabel 16 tentang Alasan Menggunakan software Komputer Untuk Keperluan Perkantoran (Office Application Software), sebanyak 84 responden menjawab Mudah digunakan (57%), 17 responden menjawab tampilan menarik (12%), 23 responden menjawab Murah (> Rp.50.000) (16%), dan 14 responden menjawab belum pernah coba office application software lainnya (14 %).

Dari tabel 15 dan Tabel 16 tentang alasan penggunaan Jenis Software Sistem Operasi (OS) dan Office Application software di kalangan Dosen IAIN Raden Fatah Palembang, kemudian analisa dan

disajikan kembali melalui data rata-rata persentase dalam tabel 17 sebagai berikut :

Tabel 17
Alasan Software Ilegal Tetap Digunakan oleh
Dosen IAIN Raden Fatah Palembang

Jenis Software	Alasan Penggunaan									
	Mudah digunakan	%	Tampilan menarik	%	Murah (< Rp.50.00,-)	%	Belum Pernah coba OS lain	%	Lainnya	%
Software Sistem Operasi (OS)	73	50	18	12	30	21	25	17	0	0
Office Application Software	84	57	17	12	23	16	14	10	0	0
Jumlah Rata-rata	78,5	53,5	17,5	12	26,5	18,5	19,5	13,5	0	0

Berdasarkan data tabel 17, dapat dilihat sebanyak 53,5 % responden menjadikan alasan utama *software* ilegal tetap digunakan adalah karena mudah digunakan (53,5%) atau dalam bahasa *software* biasa disebut *user friendly software* (*software* yang mudah digunakan orang awam). Dikarenakan memang pangsa pasar yang dibidik oleh pembuat *software* tersebut adalah hanya sebagai pemakai (*user*) yang lebih mementingkan asas praktis dan sesuai kebutuhan mereka. OS windows dan Microsoft office sudah terpatirkan dalam benak pengguna komputer di kalangan IAIN sebagai satu-satunya OS dan *Office Application Software*. Dapat dikatakan berdasarkan data dalam tabel 10 dan tabel 11 bahwa 100% Dosen iAIN Raden Fatah Palembang menggunakan Jenis *Software* Sistem Operasi (OS) Microsoft Windows dan *software* untuk keperluan perkantoran (*Office Application Software*) menggunakan Microsoft Office. Selain itu juga memang dalam kegiatan perkuliahan praktik komputer yang diperkenalkan juga dari awal perkuliahan adalah OS Windows dan Microsoft Office.

Selain alasan utama karena mudah digunakan, juga alasan tampilan menarik dijawab oleh responden sebanyak 12 %. Mengenai tampilan *software* yang menarik. Berdasarkan hasil wawancara, responden tidak terlalu mementingkannya, hanya terkadang lebih sering digunakan untuk mengganti tampilan gambar di monitor pada OS Windows dan bentuk tombol yang menarik pada *office application software* pada Microsoft Office .

Alasan yang lainnya adalah harga yang murah, sebanyak 18,5% responden menjawab alasan tersebut. Murah dalam hal ini, diartikan dalam kisaran harga dibawah Rp.50.000, pengguna sudah bisa menikmati OS Windows dan Microsoft Office. Harga OS Windows dan Microsoft Office yang berlisensi tidak akan mencukupi dengan dana Rp.50.000,-.

Dengan kisaran harga dibawah Rp. 50.000 sudah dapat memanfaatkan *software* dari Microsoft, dapat dipastikan bahwa *software* tersebut ilegal, dan jenis pelanggaran lisensi biasanya dalam bentuk *Counterfeiting / Pemalsuan software*; menduplikasi dan mendistribusikan *software* imitasi dalam jumlah tertentu. Penggunaan *Software* berlisensi dalam bentuk CD atau DVD yang kemudian dijual sangat murah di kaki lima, cukup dengan Rp.10.000,- konsumen bisa mendapatkan Microsoft Windows 7 ditambah Microsoft office 2007.

Jenis pelanggaran lisensi *software* yang lain adalah *Hard disk loading* yang biasanya dilakukan oleh perakit komputer yang melakukan instalasi menggunakan *software* ilegal. Para perakit komputer meminta biaya jasa tertentu dalam proses penginstalan *Software* berpemilik (proprietary) seperti Microsoft Windows dan Microsoft Office.

Berikut ini dapat dalam tabel 18 dapat kita lihat kisaran harga produk *software* Sistem Operasi (OS) dan *Office Application Software* dari Microsoft .

Tabel 18
Harga Produk Software Sistem Operasi (OS) dan Office
Applicaton Software dari Microsoft

	Jenis Produk Microsoft dan Harga	
Sistem Operasi	Windows XP Home	850.000
	Windows Vista Home	1.061.775
	Windows 7 Home	1.007.325
Office Application	MS Office 2007 Basic	1.524.000

Sumber : <http://www.software-asli.com/microsoft.php> -
2010

Dari tabel 18 tersebut jika pengguna hendak menggunakan OS Windows 7 Home ditambah dengan Microsoft Office 2007 Basic yang berlisensi, paling tidak harus mengeluarkan biaya tambahan sebanyak Rp.2.532.325,-. Jumlah tersebut cukup mahal, tapi merupakan konsekuensi jika kita tidak mau dianggap melanggar HKI dan Hukum Islam.

Dalam kasus software bajakan, memang microsoft termasuk software yang paling banyak dibajak di Indonesia. Bahkan bisa jadi jumlah software bajakannya melebihi aslinya. Hal ini karena didukung oleh lemahnya pengawasan masalah pembajakan dan kurangnya kesadaran hukum para pengguna komputer di Indonesia.

Kalau kita jujur dengan hukum syariat Islam yang berkembang sekarang ini, maka menggunakan produk software bajakan termasuk hal yang dilarang dalam syariat. Karena biar bagaimana pun hak ciptanya ada pada perusahaan tersebut. Kalau ingin menggunakannya, maka satu-satunya jalan adalah dengan membeli aslinya (original) baik FPP (Full Package Product) maupun OEM (Original Equipment Manufacturer). melebihi harga hardwarenya.

Kalau memang tidak mampu membeli tidak berlaku alasan darurat sebagai pembenaran. Hukum darurat itu hanya berlaku bila tidak ada alternatif lainnya yang bisa menjadi solusi dalam suatu perkara. Itu pun tetap dalam batas yang diperlukan saja. Sedangkan dalam kasus software dan sistem operasi komputer, masih banyak pilihan lainnya yang bisa dilakukan dan nyaris tanpa biaya alias gratis. Yaitu berhijrah dari *Proprietary Software* ke *Open Source Software* seperti Linux dan variannya.

Sebanyak 13,5 % menjawab belum pernah mencoba *Software Sistem Operasi* dan *Office Application Software* selain Microsoft Windows dan Microsoft Office. Selain OS dari *Proprietary Software* seperti Microsoft ada OS lain dari *Software Open Source* seperti Linux dan variannya. Selain Microsoft office dari Microsoft ada alternatif *Office Application Software* lain dari *Open Source software* antara lain yaitu open office. Semua orang dapat dengan gratis menggunakan Open Office tanpa harus membayar lisensi tertentu. Open Office dapat digunakan di OS Microsoft Windows.

Software Open Office.org berisikan semua perangkat lunak perkantoran yang dibutuhkan oleh Dosen, dalam satu paket tunggal. Tidak perlu khawatir versi yang mana untuk menginstal: satu program instalasi menyediakan segalanya. Instalasi juga menyertakan fitur-fitur yang beberapa pesaing tidak mahal - misalnya, kemampuan untuk membuat file pdf ketika kita ingin menjamin apa penerima yang akan melihat pada komputer mereka.

Ada juga berbagai ekstensi berkembang: fitur tambahan yang setiap pengembang dapat menyediakan. Menggunakan OpenOffice menunjukkan komitmen Anda untuk memberikan layanan bernilai

terbaik. Hal ini tidak dimiliki oleh organisasi komersial. Para Dosen juga dapat mendistribusikan Software Open Office secara bebas kepada mahasiswa, karyawan dan dosen yang lain. Tetapi yang jelas *Software Open Source* itu tidak harus membayar lisensi, dan dapat digunakan dengan bebas secara legal dan tentu saja halal.

Pada microsoft office 2007 kalau kita hendak mengetik data atau bahan kuliah kita menggunakan Microsoft Word sedangkan pada openoffice kita menggunakan text document yang semua fungsi tombol-tombolnya sama dengan Microsoft word dan sama sama mudah digunakan, baik oleh orang baru menggunakan komputer sekalipun.

Berdasarkan dari data hasil penelitian menunjukkan bahwa 85,5% Dosen Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menggunakan *software* ilegal. Pemanfaat *software* ilegal dari melanggar hukum formal karena melanggar UU No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dan juga haram dari segi hukum Islam yang memandangnya sebagai *huquq maliyyah* (hak kekayaan) sesuai dengan Fatwa MUI Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI).

Ketika dosen sebagai tenaga pendidik mulai menggunakan *software* ilegal dan akhirnya merasa bahwa hal itu adalah hal yang biasa saja padahal itu merupakan hal yang sangat bertentangan dengan etika, moral dan hukum,. Untuk lingkungan pendidikan seperti di IAIN Raden Fatah yang mengemban misi pendidikan dan moral islami, penggunaan *software* ilegal adalah hal yang sangat tidak etis dan sangat memalukan.

Terhadap isu penggunaan *software* ilegal tersebut penulis menawarkan alternatif-alternatif solusi bagi penentu kebijakan di IAIN Raden Fatah Palembang.

1. Alternatif Solusi A : *Microsoft Campus Agreement* (MCA)

Mengingat pemanfaatan *software* dari Microsoft berupa OS Windows dan Microsoft Office digunakan oleh semua Dosen IAIN Raden Fatah Palembang. Kebutuhan akan lisensi legal dari *software* Microsoft tersebut adalah sebuah keharusan yang harus menjadi prioritas pemikiran dan pertimbangan para penentu kebijakan di IAIN Raden Fatah Palembang.

Untuk kalangan Pendidikan Microsoft menawarkan program *Microsoft Volume Licensing* dimana program ini memberikan penawaran lisensi volume untuk pelanggan dari lingkungan akademik. Dengan program lisensi berlangganan, pengguna memiliki hak untuk menjalankan pemilihan produk, dan setiap *upgrade* atau *downgrade* dari produk tersebut, untuk jangka waktu yang ditentukan. Salah satu program Microsoft dalam program lisensi berlangganan bagi pelanggan pendidikan adalah *Microsoft Campus Agreement* (MCA) yang menawarkan kesederhanaan penghitungan berdasarkan

jumlah total karyawan, Dosen dan Mahasiswa bukan jumlah komputer. *Microsoft Campus Agreement* adalah suatu bentuk perjanjian kerjasama antara Microsoft dengan sekolah/kampus dalam hal pembelian lisensi software asli yang dikeluarkan Microsoft secara legal.

Keuntungan Subscription Licensing seperti MCA ini adalah :

1. Pemakaian software dari Microsoft secara legal.
2. Gratis Welcome Kit CD terbaru dari Microsoft
3. Harga penawaran berlangganan lisensi software Microsoft yang lebih efisien 80-90% dari harga retail.
4. Jika Microsoft mengeluarkan produk baru, para anggota Campus Agreement akan langsung mendapatkan produk up date gratis.
5. Mendapat perlindungan hak penggunaan software asli dari Microsoft.
6. Dengan fasilitas WAH (Work at Home) maka staf pengajar/administrasi dan mahasiswa dapat bebas menggunakan software Microsoft di rumah masing-masing.
7. Terlindungi dari tuntutan hukum dan sanksi pidana, pelanggaran peraturan pemerintah, Undang-Undang Hak Atas kekayaan Intelektual No. 19/2002.

Pengguna yang diijinkan adalah dalam MCA adalah Dosen, Administrasi, mahasiswa dan Lembaga/Organisasi Resmi di Lingkungan sivitas akademika yang bersangkutan. Pengguna dilarang keras menyebarkan perangkat lunak MCA dan kunci lisensi produk (License Product Key) dengan cara apapun. Pelanggaran akan diberikan sanksi dari sesuai dengan Undang - Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Untuk mengikuti program MCA tahap awal adalah Menghitung Full-time Equivalent (FTE). FTE disini dapat dipahami sebagai jumlah total mahasiswa ditambah jumlah dosen dan karyawan. Jika diperkirakan jumlah FTE IAIN Raden Fatah Palembang sebagai berikut :

Mahasiswa 2000 + Dosen 300+karyawan 300 = FTE 2500

Mengenai tarif lisensi ada dua

FTE kurang dari 3000	Level A
3000 atau lebih	Level B

Jenis Software dari Microsoft yang ditawarkan dalam Program MCA dalam paket software yang disebut *The Campus Desktop package* yang termasuk didalamnya :

- Windows 7 ® Enterprise Upgrade
- Microsoft Office Enterprise 2007 and Microsoft Office 2008 for Mac
- Microsoft Core CAL Suite

MCA bukanlah lisensi kepemilikan sebuah software yang telah

kita bayar sewa lisesnsi. MCA adalah program lisensi berlangganan bagi kalangan pendidikan yang mendapatkan lisensi menggunakan dalam jangka waktu tertentu, selama kurun waktu tertentu sesuai perjanjian (*agreement*) dengan nilai sewa sebesar yang sudah ditentukan. Lisensi tersebut berupa lisensi penggunaan paket *software* dari pemberi *campus agreement* tersebut. Nilai sewa tersebut terkait/dipengaruhi juga jumlah *software* yang diperjanjikan. Jadi kita hanya mempunyai hak sewa, setelah perjanjian berakhir kita tidak boleh menggunakan lagi.

Alternatif Solusi B : *Open Source Campus Agreement (OSCA)*

Sebagai upaya upaya nasional dalam rangka memperkuat sistem teknologi informasi nasional serta pemanfaatan perkembangan teknologi informasi global melalui pengembangan dan pemanfaatan Open Source Software (OSS), sejak tahun 2004 pemerintah Indonesia melalui Menristek telah mencanangkan program "Indonesia Go Open Source (IGOS)". Deklarasi IGOS tahun 2004 ditandatangani oleh 4 menteri: Menristek, Mendiknas, Menkeham dan Menkominfo, dan selanjutnya pada IGOS SUMIT-2 tahun 2008, program IGOS telah didukung dan ditandatangani oleh 18 Menteri.

Setelah program IGOS, memperkenalkan Sistem Desktop Nasional (SDN) IGOS, yaitu sistem operasi berbasis Linux sebagai produk promosi IGOS, produk-produk perangkat lunak lainnya terus bermunculan. Pada situs resmi IGOS, tercatat sepuluh distro (distribusi Linux) nasional selain SDN IGOS, yang diperuntukkan bagi komputer personal maupun warung internet (warnet), yaitu Blankon, IGOS Berdikari, IGOS Billing, IGOS Kwartet, IGOS Laba-laba, IGOS Nusantara, Pinux, Trustix Merdeka, Waroeng IGOS, dan WINBI. Perkembangan perangkat lunak berbasis open source ini juga didukung oleh kemunculan situs internet yang menunjang program IGOS.

Selain situs resmi IGOS (www.igos.web.id), terdapat banyak situs komunitas pendukung OSS lainnya, yang terdiri dari KPLI (Komunitas Pecinta Linux Indonesia), IGOS Center, situs komunitas distro Linux, repositori aplikasi OSS, dan lain-lain, yang tersebar di berbagai daerah.

Berkaitan dengan semangat IGOS, dikeluarkan juga Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika NO:05/SE/M. KOMINFO/10/ 2005 tertanggal 24 oktober 2005 tentang pemakaian dan pemanfaatan penggunaan piranti lunak legal di lingkungan instansi pemerintah Surat Edaran. Nomor : SE/01/M.PAN/ 3/2009 tanggal 30 Maret 2009. tentang. *Pemanfaatan Perangkat Lunak Legal dan Open Source Software (OSS)*, dengan batas waktu paling lambat 31 Desember 2011. Dalam hal ini negara mendukung penuh pemanfaatan Open Source Software di lingkungan Instansi Pemerintah seperti IAIN Raden Fatah Palembang.

Berkenaan dengan isu penggunaan *software* ilegal di kalangan Dosen IAIN Raden Fatah Palembang, maka tawaran solusi

alternatif untuk memanfaatkan OSS merupakan tawaran solusi yang beriringan dengan program pemerintah republik Indonesia.

Untuk itulah ditawarkan konsep OSCA (*Open Source Campus Agreement*). Menurut I Made Wiryana (2000) OSCA ini lebih melibatkan pada kesediaan kampus (intensi) dan dapat diprakarsai bukan saja oleh pihak lembaga pendidikan, tetapi oleh mahasiswa dan alumni. Jadi bukan suatu agreement yang berupa kontrak yang mengikat, tetapi lebih kepada kontrak moral akan kesediaan untuk mengikuti kesepakatan ini. (Wiryana, 2000).

Pada OSCA ini pihak kampus, mahasiswa ataupun pihak institusi sepakat untuk memanfaatkan program-program Open Source dalam operasional dan alat bantu pengajarannya. Pada penerapan OSCA ini kampus dan mahasiswa memperoleh keuntungan secara langsung dan jelas, antara lain :

1. Kampus dan mahasiswa terhindar dari cap pembajak perangkat lunak. Seperti kita pahami bersama, saat ini bisa dikatakan sebagian besar perangkat lunak yang digunakan di kampus (baik mahasiswa maupun institusinya) adalah perangkat lunak bajakan. Hal ini sangat kontradiktif sekali dengan posisi kampus dan mahasiswa sebagai moral force pada gerakan reformasi menuju Indonesia baru.
2. Kampus memperoleh perangkat lunak Open Source yang merupakan perangkat lunak berkualitas tinggi.
3. Kampus telah membantu Indonesia melakukan penghematan besar karena terhindar dari pembelian perangkat lunak.
4. Kampus dan mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk mempelajari teknologi informasi mutakhir yang terbuka.
5. Kampus dan para mahasiswanya berkesempatan untuk bergabung dalam komunitas developer perangkat lunak Open Source tingkat dunia.

Agar terhindar dari suatu kesan pemaksaan, maka sebelum kampus terjun ke dalam OSCA, maka dilakukan pooling kepada mahasiswa dan staff. Hal ini disebabkan mereka akan mengalami perubahan perangkat lunak yang digunakan. Pooling ini dapat dilakukan secara resmi ataupun non resmi, baik melalui Internet ataupun media lainnya.

Apabila telah sepakat untuk mengikuti OSCA ini maka Kampus tersebut akan menerima perlengkapan berupa contoh perangkat lunak Open Source dan dokumentasi awal (misal aplikasi yang setara dan sebagainya)

Kampus dan para mahasiswanya dapat segera menerapkan agreement itu, komunitas *Open Source* terdekat akan mendukung informasi yang dibutuhkan. Di situs milik kampus tersebut boleh dipasang label 'pendukung OSCA. Nama institusi tersebut akan

masuk dalam daftar pendukung OSCA yang akan dipublikasikan Internasional.

Alternatif Solusi Praktis dan Strategis terhadap isu penggunaan Software ilegal di Kalangan Dosen IAIN Raden Fatah Palembang pada khususnya dan Isu penggunaan Software ilegal di lingkungan sivitas akademika IAIN pada umumnya telah ditawarkan kepada penentu kebijakan di IAIN Raden Fatah Palembang. Untuk lebih jelasnya penulis akan menyederhanakan kedua alternatif solusi tersebut dalam tabel berikut ini :

Tabel 19
Microsoft Campus Agreement (MCA) dan Open Source Campus Agreement (OSCA)

Parameter	Microsoft Campus Agreement (MCA)	Open Source Campus Agreement (OSCA)
Jenis Lisensi Software	Lisensi berlangganan	Tidak perlu lisensi
Sifat Perjanjian	Mengikat (Dalam jangka waktu tertentu)	Tidak mengikat (lebih kepada ikatan moral)
Jangka Waktu Lisensi Software	Terbatas (1 Tahun)	Tidak Terbatas
Anggaran Dana yang diperlukan untuk Software	Harga software 80-90% dari harga retail	Hampir tanpa biaya (Sangat murah) hanya untuk biaya Pelatihan dan Instalasi
Alokasi Pemanfaatan Dana	Pembelian / Pembayaran lisensi	Pelatihan dan Seminar, Sosialisasi, penggandaan
Legalitas Software	Legal (terbatas waktu lisensi)	Legal (bebas digunakan siapa saja)
Yang berhak memanfaatkan Software	Hanya sivitas akademika yang ikut MCA	Tidak hanya sivitas akademika tapi juga pihak lain yang memerlukan
Cara Penggunaan	Tidak perlu pelatihan dan Sosialisasi cara penggunaan	Perlu pelatihan dan Sosialisasi cara penggunaan
Dukungan Pemerintah	Didukung melalui Undang-Undang HKI	Didukung melalui Program IGOS

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Semua dosen IAIN Raden Fatah Palembang menggunakan Jenis *Software Sistem Operasi (OS) Microsoft Windows* dan *software* untuk keperluan perkantoran (*Office Application Software*) menggunakan *Microsoft Office*. 85,5% Dosen Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang masih menggunakan *Software Ilegal*, dan hanya 14,5 % menggunakan *Software legal*. Ilegal disini dalam arti tidak dimilikinya lisensi Keaslian *software* tersebut yang biasanya dalam bentuk label Sertifikat keaslian (COA). Keberadaan lisensi ini sangat penting sebagai bentuk legalitas sebuah *Proprietary Software* seperti *Microsoft Windows* sebagai *software* yang sangat populer di kalangan Dosen IAIN Raden Fatah Palembang.
2. Sebanyak 53,5 % responden menjadikan alasan utama *software* ilegal tetap digunakan adalah karena mudah digunakan (53,5%) atau dalam bahasa *software* biasa disebut *user friendly software* (*software* yang mudah digunakan orang awam). Alasan karena tampilan menarik dijawab oleh responden sebanyak 12 %. Sebanyak 18,5% responden menjawab alasan murah, Murah dalam hal ini, diartikan dalam kisaran harga dibawah Rp.50.000, pengguna sudah bisa menikmati OS Windows dan Microsoft Office. Harga OS Windows dan Microsoft Office yang berlisensi tidak akan mencukupi dengan dana Rp.50.000,-. Jenis pelanggaran lisensi yang terjadi dalam bentuk *Counterfeiting / Pemalsuan software* dan *Hard disk loading*. Sebanyak 13,5 % responden menjawab belum pernah mencoba *Software Sistem Operasi* dan *Office Application Software* selain Microsoft Windows dan Microsoft Office, padahal selain OS dari *Proprietary Software* seperti Microsoft ada OS lain dari *Software Open Source* seperti Linux dan variannya. Selain Microsoft office dari Microsoft ada alternatif *Office Application Software* lain dari *Open Source software* antara lain yaitu open office
3. Terhadap isu penggunaan *software* ilegal tersebut ditawarkan alternatif-alternatif solusi bagi penentu kebijakan di IAIN Raden Fatah Palembang, yaitu Alternatif Solusi A : *Microsoft Campus Agreement (MCA)*. Dengan pertimbangan sudah banyak orang yang sudah terbiasa dengan penggunaan Produk Microsoft seperti Windows dan Ms Office dan juga kebutuhan akan lisensi yang legal terhadap *software* tersebut sesuai dengan tuntutan dari UU No 19 tahun 2002. Maka dapat dipertimbangkan melakukan kesepakatan dengan Microsoft melalui model lisensi *Microsoft Campus Agreement (MCA)* yang menggunakan lisensi khusus kalangan pendidikan. Perjanjiannya bersifat mengikat sesuai kesepakatan. Lisensi nya berlangganan dalam jangka waktu dan biaya tertentu

yang sudah diberikan harga khusus untuk kalangan kampus. Pemanfaatan software hanya terbatas untuk sivitas akademika kampus termasuk dosen, karyawan dan mahasiswa tidak boleh digunakan pihak lain diluar kesepakatan MCA.

Alternatif Solusi B : *Open Source Campus Agreement (OSCA)*. Alternatif solusi lain adalah *Open Source Campus Agreement (OSCA)*. Dalam OSCA ikatan perjanjian lebih kepada ikatan moral. Dukungan untuk pemanfaatan *software open source* ini juga didukung oleh pemerintah dengan program IGOS (Indonesia Go Open Source). Tidak memerlukan lisensi khusus, semua orang dapat dengan bebas mempelajarinya dan saling bertukar informasi tentang *software open source*. Status penggunaan legal tanpa batas dengan kode sumber program pun yang terbuka. Hampir tanpa biaya yang harus dikeluarkan kecuali biaya pelatihan, sosialisasi cara penggunaan software dan penggandaan software, karena memang selama ini orang sudah terbiasa dengan produk *proprietary software* seperti *microsoft*.

Daftar Pustaka

- Borking, John J. 1988. *Third Party Protection of Software dan Firmware, First Edition*. Amsterdam : Elsevier Science Publishing Company.
- Makarim, Edmon. 2004. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, Andi. 1990. *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Hotchkiss, Carolyn. 1994. *International Law for Business*. New York: Mc Graw-Hill Inc.
- Singarimbun, M dan Sofian Effendi. 1987. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP3S
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Jakarta : Alfabeta.
- Surakhmad, Winarno. 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung : Tarsito
- Suryaman, Anti. 2005. *Sosialisasi Pemanfaatan Software Legal*. jurnal Pusdatin Vol. 2 No. 12 Bulan . Jakarta : Departemen Pertanian
- Wiryana, I Made. 2000. *Open Source Campus Agreement (OSCA)*. Tahun I, Nomor 6, Januari 2000.
- <http://www.elektroindonesia.com/elektro/li1299b.html>, 22/10/2010